

ANALISIS OTONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Analysis of Autonomy and Education Financing in Improving the Quality of Education

Atika Mujahidah¹, Alfira Okta Mayangsari², Mala Nur Kumairo³

Universitas Negeri Surabaya

atika.22016@mhs.unesa.ac.id; alfira.22030@mhs.unesa.ac.id

Article Info:

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
| May 13, 2024 | May 16, 2024 | May 19, 2024 | May 22, 2024 |

Abstract

This article aims to investigate regional autonomy and education financing management in relation to efforts to improve the quality of education. The method used is the Systematic Literature Review (SLR) method, defined as a systematic literature review that is translated into Indonesian. This SLR method uses the PRISMA model. The results of this study show that education financing management affects the quality of school education. Financing management is a process of optimizing existing sources of funds, allocating available funds and distributing them as facilities or means of supporting the learning process so as to create an effective and efficient and much better learning process. To achieve good school quality, education costs must be managed optimally and maximally. Therefore, the stages of education financing management need to be considered and prioritized.

Keywords: *Autonomy, Financing, Education Quality*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui otonomi daerah dan manajemen pembiayaan pendidikan kaitannya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Metode yang digunakan adalah metode Systematic Literature Review (SLR) didefinisikan sebagai sebuah karya tulis literatur sistematis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam metode SLR ini menggunakan model PRISMA. Dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan

mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta jauh lebih baik. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal dan maksimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama.

Kata kunci: Otonomi, Pembiayaan, Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha bersama untuk menjalankan roda pembelajaran yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat UUD Tahun 1945 pada Alinea keempat. Pendidikan merupakan system yang berproses memberikan pengalaman baru dan pengetahuan lain kepada peserta didik sebagai pemegang estapet pembangunan bangsa. Berjalan atau tidaknya roda pendidikan tergantung pembiayaan dalam pendidikan itu sendiri. Masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan. Manajemen yang baik dalam pembiayaan pendidikan mempengaruhi mutu pendidikan itu sendiri (Nurhayati et al., 2022).

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program-program pendidikan yang telah ditetapkan (Fatimah, 2020). Pendapatan atau sumber dana Pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Masyarakat atau orang tua.

Pembiayaan pendidikan sangat penting dan dibutuhkan karena memberikan kemudahan dalam pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat perlu evaluasi dan perhitungan guna mengefisienkan pengelolannya sehingga keuntungan dari pendidikan tersebut dapat maksimal. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum adanya otonomi daerah, pembiayaan sekolah dasar (SD) menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, sedangkan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab pusat. Namun setelah otonomi daerah berlaku, pengelolaan sekolah mulai SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota berada di bawah kendali

Pemerintah Daerah, sedangkan Dinas Pendidikan provinsi berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi (Trihantoyo, 2020). Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan, menyiapkan sumber daya manusia, masyarakat dengan pemerintah memiliki peran yang sangat mendasar dalam membiayai pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat maksimal (Tamam, 2018).

Otonomi daerah atau desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus sistem pemerintahan dalam upaya kemajuan sesuai cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan sejahtera (Masduki, 2022). Dalam kaitan ini adanya otonomi membawa konsekuensi pembiayaan pendidikan, baik mengenai sumber pendanaan, sarana-prasarana dan kepegawaian. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah karena pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, serta pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu :

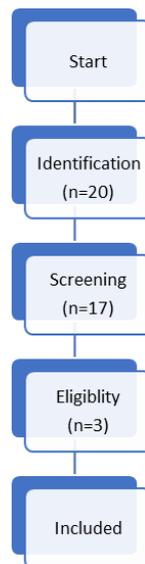
1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki.
2. Efisiensi keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.
3. Efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan (Winarsih, 2018).

Dalam artikel ini, penulis akan membahas bagaimana kaitan antara otonomi pendidikan dengan sistem pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah yang akan menyoroti seputar otonomi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan serta perencanaannya.

METODE

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) didefinisikan sebagai sebuah karya tulis literatur sistematis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. SLR adalah metode tinjauan literatur yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua temuan penelitian dari topik tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Metode ini diterapkan secara sistematis sesuai dengan pedoman dan protokol yang membantu meminimalisir subjektivitas dalam proses tinjauan literatur. SLR digunakan untuk dapat mengamati kesenjangan penelitian serta area penelitian baru yang menarik untuk diteliti (Sastypratiwi & Dwi, 2020).

Dalam metode SLR ini menggunakan model PRISMA. PRISMA adalah pendekatan berbasis bukti minimal dengan fokus praktis yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menyajikan berbagai temuan sistematis dan metaanalitis yang menunjukkan nilainya. Terdapat persyaratan baru yang membatasi potensi metode ini untuk mengidentifikasi, mengukur, meringkas, dan mensintesis penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodifikasi struktur dan analisis data item untuk memfasilitasi penggunaan metode PRISMA. PRISMA difokuskan pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh para penulis untuk memastikan bahwa karya mereka jelas dan komprehensif, apa pun jenis penelitiannya. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan dan mengkategorikan latar belakang informasi yang terkait dengan fokus studi, khususnya tentang otonomi dan pembiayaan Pendidikan (Habibi & Artha Glory Romey Manurung, 2023).



Gambar 1. Diagram alur tinjauan literatur sistematis berdasarkan PRISMA

Berdasarkan gambar diatas, proses ini dilakukan dengan cara penulis mencari beberapa artikel melalui google scholar sejumlah 20 artikel. Pada tahap selanjutnya, penulis menyaring dengan cara memeriksa setiap artikel dengan membaca keseluruhan artikel. Selanjutnya, penulis menemukan beberapa artikel yang kurang sesuai dengan topik yang dibahas yaitu sejumlah 3 dan yang sesuai dengan topik artikel berjumlah 17 artikel. Dari data artikel tersebut, dilakukan analisis yang menghasilkan 20 artikel yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

HASIL



Gambar 2. Kesenjangan penelitian (sumber: VOSviewer)

Berdasarkan hasil 20 jurnal penelitian tentang otonomi pendidikan dengan menggunakan aplikasi VOSVIEWER ditemukan bahwa Implementasi otonomi pendidikan menunjukkan kenaikan indeks dari tahun ke tahun namun kenyataan yang didapat,

pelaksanaan otonomi pendidikan masih belum berjalan dengan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya masalah pada pembiayaan mengenai adanya perubahan anggaran yang ditetapkan sebelumnya dan juga kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Kebijakan dari pemerintah pusat kurang dirasakan manfaatnya oleh daerah dimana pembangunan hanya terpusat pada di pusat kota di tiap daerah sementara daerah mengalami kemunduran dan keterlambatan dalam pembangunan.

Otonomi memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk mengelola sumber daya dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan adaptabilitas terhadap dinamika lingkungan pendidikan. Sementara itu, pembiayaan yang memadai mendukung infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi kurikulum. Dengan adanya otonomi, institusi pendidikan dapat merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Pembiayaan yang cukup juga memungkinkan implementasi teknologi, peningkatan kesejahteraan guru, dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Sehingga, kombinasi otonomi dan pembiayaan pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, memacu peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Keterpaduan otonomi pendidikan dan pembiayaan pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Otonomi pendidikan memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan dinamika lingkungan pendidikan. Sementara itu, pembiayaan pendidikan yang memadai memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan keterpaduan ini, lembaga pendidikan dapat merancang kebijakan dan strategi yang tepat, serta memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hasilnya, lingkungan belajar yang optimal tercipta, yang memungkinkan untuk inovasi, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Konsep Otonomi Pendidikan

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai

tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan (D. Polli, 2016). Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahal biaya pendidikan. Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Otonomi (desentralisasi) pendidikan adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (wewenang) dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala Keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada tingkatan di bawahnya (Wachyuppy, 2022). Otonomi Pendidikan juga berarti suatu pemberian kewenangan, mandat, kepercayaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan atau dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan mencakup enam aspek (Lazuardi, 2013), yakni:

- a. Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah.
- b. Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
- c. Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah.
- d. Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan.
- e. Hubungan kemitraan stakeholders pendidikan.
- f. Pengembangan infrastruktur sosial.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak-Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat” (Rosyid & Ali, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif. Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Pelaksanaan Otonomi Pendidikan, yang juga dikenal sebagai desentralisasi pendidikan, belum berjalan seperti yang diharapkan karena faktor sosial, politik, dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan berdampak pada kurikulum, efektivitas administrasi, pendapatan dan biaya siswa, serta partisipasi siswa (Kholilah, 2016). Menurut pernyataan tersebut, desentralisasi pendidikan yang terjadi di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara global dan tidak selalu menjadi bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Ada enam faktor yang menyebabkan otonomi pendidikan tidak berjalan, yaitu sebagai berikut (Arsyad, 2018):

- a. Belum adanya aturan main tentang gaji dan jadwal kerja di kota dan provinsi.

- b. Bantuan dari sektor publik termasuk bantuan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara imparisial karena SDM yang belum stabil dan fasilitas yang belum memuaskan.
- c. Pendidikan dan APBD yang masih dalam tahap awal.
- d. Perlunya pemerintah daerah atau nasional untuk lebih mempertimbangkan masyarakat dalam reformasi pendidikan.
- e. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Bupati Walikota yang tinggal di daerah yang tidak terlalu kondusif untuk pendidikan, pendidikan tidak diprioritaskan di atas segalanya.
- f. Perbedaan sarana, prasarana, dana yang dimiliki dimana kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan standar pendidikan nasional yang memperhatikan kondisi pertumbuhan kemandirian masing-masing daerah. Otonomi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya langkah guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3. Implementasi Otonomi Daerah dalam Dunia Pendidikan

Pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam dunia pendidikan merupakan topik yang penting karena pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengelola urusan nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Implementasi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan, penerapan. Kebijakan implementasi adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan resmi yang dibuat oleh organisasi tertentu untuk menetapkan standar nilai bagi masyarakat. Perilaku dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan. Anggota organisasi atau komunitas masyarakat biasanya proaktif dalam memecahkan masalah.

Perubahan kelembagaan sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan satuan kerja yang membentuk manajemen lembaga pendidikan di suatu

daerah bagian. Satuan kerja ini harus memenuhi persyaratan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan ini termasuk masalah manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan perubahan anggaran untuk profesionalisme, staf, dan pelatihan. Kebijakan otonomi daerah dan pendidikan mencakup tujuan tambahan untuk membantu siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi pada berbagai aspek masyarakat, termasuk, tanpa diragukan lagi, semua aspek manajemen sekolah. Adapun beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan menurut (Nasihah et al., 2023) adalah :

- a. Komunikasi. Tiga aspek penting dari berlangsungnya komunikasi kebijakan yaitu: penyebaran, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi merupakan faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan. Pejabat pelaksana keputusan harus memastikan bahwa keputusan telah disusun dan memberikan perintah untuk melaksanakannya. Faktor kedua yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah transparansi. Dengan kata lain, pedoman pelaksanaan tidak hanya diberikan kepada pembuat kebijakan, tetapi komunikasi yang disampaikan juga harus transparan. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi. Agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik, proses implementasi harus konsisten dan jelas.
- b. Sumber-sumber pendukung merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan keterampilan yang mempuni untuk memenuhi kewajiban mereka, kekuasaan dan sarana yang mendukung dalam penyediaan layanan Publik.
- c. Struktur Birokrasi. Birokrasi adalah satu Tubuh yang paling umum bahkan di dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh, baik struktur pemerintahan maupun organisasi swasta.
- d. Kecenderungan atau perilaku. Kecenderungan karakteristik para pelaku memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang baik. Jika pelaksana berperilaku baik dalam melaksanakan kebijakan tertentu, maka dalam hal ini berarti adanya sebuah dukungan, yang mungkin mereka akan mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti yang diinginkan oleh pembuat keputusan semula.

Proses implementasi kebijakan mengevaluasi kesesuaian antara program yang direncanakan dan program yang dilaksanakan di lapangan. Untuk mengurangi kemungkinan kegagalan suatu kebijakan yang diterapkan, Tachjan (2008: 26) dalam (Putera, 2015) menjelaskan tiga komponen penting berikut :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- c. Adanya pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan otonom, dapat memaksimalkan pencapaian misi pendidikan nasional dengan meningkatkan kinerja sistem pendidikan dan memberikan dukungan untuk sarana yang tersedia, prasarana, dan dana yang memadai untuk memungkinkan pelayanan pendidikan dilaksanakan secara merata dan untuk memungkinkan pelayanan pendidikan nasional dilaksanakan dengan relevan, efektif, dan efisien (Nursofah et al., 2023). Namun, tidak jarang pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan amanat undang-undang tentang otonomi daerah, seperti yang terjadi di Papua Barat. Jadi, dalam hal ini, Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa minimal prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan tersedia. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk menyediakan sarana penting dan gaji minimum guru. Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan dukungan keuangan dan fasilitas untuk menyediakan pendidikan nasional yang berkualitas.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui untuk meningkatkan kualitas pendidikan, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendidikannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas didalam pengelolaan pendidikan. Otonomi daerah dalam dunia pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, tetapi jika diterapkan dengan benar, itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

4. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah suatu konsep yang harus ada dan tidak dapat dipahami tanpa mempelajari ide-ide mendasar yang mendasari konsep tersebut. Persoalan ekonomi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembiayaan pendidikan. Secara umum pembiayaan pendidikan dalam (Sudrajat, 2019) Pembiayaan pendidikan adalah suatu proses kerjasama antara individu dengan kelompok serta dalam pengelolaan pembiayaan pada kegiatan-kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan.

Sedangkan menurut (Sudarmono et al., 2021) adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini. Dari apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola dana pendidikan diperlukan suatu gagasan dan sistem perencanaan yang matang untuk membuat sistem pembiayaan pendidikan nasional Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Kebanyakan sekolah dan madrasah menghadapi masalah dengan sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah tenaga kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai untuk memberikan kompensasi kepada guru dan tenaga pendidiknya. Banyak guru yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka di bidang pendidikan. Akibatnya, pendidikan menjadi buruk, tidak berkualitas, dan bahkan jauh tertinggal.

Biaya dalam dunia pendidikan memiliki cakupan luas, yaitu setiap jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik secara finansial maupun dalam bentuk barang dan jasa. Pembiayaan pendidikan adalah proses merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola biaya yang terkait dengan penyelenggaraan proses pendidikan. Adapun macam-macam pembiayaan pendidikan ada tiga macam menurut (Mesiono & Haidir, 2021), yaitu :

- a. Biaya investasi satuan pendidikan, yakni biaya investasi satuan pendidikan

yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

- b. Biaya personal, yakni Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya operasi satuan pendidikan. biaya operasi satuan pendidikan meliputi: a) gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, b) bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, c) biaya operasi pendidikan tidak langsung, seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pemerintah seharusnya bertanggung jawab secara penuh atas pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat, karena ini adalah amanat dari UU yang sudah diatur dalam sebuah konstitusi negara kita Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menetapkan anggaran untuk pendidikan melalui anggaran belanja negara, baik APBN maupun APBD. Adapun besaran biaya anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai amanah UUD Negara Republik Indonesia pada pasal 31 ayat 4 tahun 1945 adalah sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kalau untuk daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dengan nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Mesiono & Haidir, 2021).

Secara khusus disebutkan bahwa dana minimal untuk pendidikan dialokasikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dialokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD untuk gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah. Untuk berpartisipasi dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat harus berpartisipasi dalam manajemen dan pembiayaan sekolah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Mereka juga harus berpartisipasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Sumber daya untuk pendidikan berbasis masyarakat dapat berasal dari masyarakat, penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, atau sumber daya lain yang tidak bertentangan dengan hukum. Adapun sumber pembiayaan pendidikan selain dari pemerintah adalah orang tua/wali/mahasiswa dan masyarakat biasanya terdiri dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang sebelumnya terdiri dari BP3, uang

pembangunan, dan sumber daya lainnya yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dimana proses ini termasuk perencanaan, penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas.

5. Perencanaan Penyusunan Anggaran Biaya Pendidikan

Perencanaan adalah proses penentuan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan keuntungan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut logika ini, perencanaan adalah sejenis keputusan. Penganggaran adalah suatu jenis kegiatan atau proses pembuatan anggaran. Penyusunan anggaran pada dasarnya adalah negosiasi atau perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan alokasi biaya suatu penganggaran (Yopy & Dewanti, 2016). Salah satu cara untuk menggambarkan anggaran adalah rencana manajerial. Diasumsikan bahwa penyusunan anggaran akan memberikan langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah dicanangkan sebelumnya, sedangkan ramalan hanyalah sarana untuk memprediksi apa yang akan terjadi tanpa memberikan bukti bahwa ramalan tersebut akan terjadi (Ma'sum et al., 2023). Ramalan dapat terjadi setiap hari atau setiap minggu tanpa ada tujuan tertentu yang dipikirkan, dan biasanya tidak dilakukan dengan melakukan analisis yang sistematis terhadap perbedaan antara hasil aktual dan ramalan.

Salah satu pertimbangan penting dalam proses penganggaran adalah bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien. Inilah alasan mengapa diperlukan suatu proses yang metode dalam penganggaran. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama fase transisi. (b) Mengidentifikasi berbagai substansi yang disebutkan dalam bentuk uang, material, dan substansi lainnya. (c) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, karena anggaran dasar merupakan laporan keuangan. (d) Memformat informasi sesuai dengan format yang telah disiapkan sebelumnya. (e) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan)

dalam tahap ini dilakukan dengan mempertimbangkan secara obyektif dan subyektif melalui rapat-rapat (Batubara, 2022).

Seperti yang telah disebutkan di atas, anggaran tersebut mencakup tiga kegunaan, yaitu:

a. Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja, memberikan arahan, dan terkadang mengidentifikasi tujuan yang perlu dipenuhi oleh proyek yang akan datang.

b. Sebagai alat untuk pengawasan kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk koordinasi kerja agar semua departemen dalam perusahaan dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif, memenuhi target yang telah ditentukan.

c. Sebagai alat untuk evaluasi kerja

Anggaran juga berfungsi sebagai tolok ukur, alat pembanding dalam menentukan (mengevaluasi) keberhasilan inisiatif perusahaan saat ini. Dengan membandingkan antara biaya-biaya yang ada di dalam anggaran dengan pendapatan yang direalisasikan dari hasil kerja perusahaan, maka dapat diketahui apakah perusahaan telah mencapai tingkat keberhasilan karyawan yang memuaskan atau tidak.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan adalah proses penentuan tindakan untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada. Penganggaran adalah pembuatan anggaran yang melibatkan negosiasi alokasi biaya. Anggaran digambarkan sebagai rencana manajerial yang membantu dalam merealisasikan tujuan perusahaan. Ramalan digunakan untuk memprediksi tanpa bukti, sementara anggaran memberikan pedoman kerja, alat pengawasan, dan evaluasi kinerja. Langkah-langkah dalam penganggaran mencakup identifikasi kegiatan, sumber daya, dan format informasi, serta memperoleh persetujuan. Anggaran berfungsi sebagai pedoman, alat pengawasan, dan evaluasi kinerja perusahaan.

KESIMPULAN

Desentralisasi pendidikan memandang sekolah sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan pendidikan. Desentralisasi juga memberikan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan dan kecenderungan terhadap kondisi regional dan lokal. Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan memerlukan masa transisi. Penyelenggara pendidikan, seperti para pelaku maupun penyelenggara, harus proaktif, kritis, dan mau berubah, seperti halnya reformasi pendidikan. Belajar dari pengalaman masa lalu yang didominasi oleh sistem pendidikan yang sosialis dan kurang demokratis, membuat bangsa ini semakin terdistorsi.

Penting bagi kita untuk melihat kepentingan bangsa dalam arti yang lebih luas, yang berasal dari kebutuhan individu, kelompok, atau pemerintah secara luas. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan pendidikan yang konsisten dan bijaksana, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota bangsa dan martabat serta masyarakat umum yang merayakan hari raya keagamaan dan hari puasa. Sebagai hasilnya, bangsa dalam konteks ini mampu belajar dari bangsa-bangsa besar di dunia. Dalam mencapai mutu pendidikan tidak akan tercapai dengan sarana dana yang lengkap dan canggih, atau relevan dengan kebutuhan program-program yang ditangani. Ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa mutu pendidikan hanyalah pendidikan tradisional dengan fokus pada penggunaan fasilitas atau alat tradisional. Pernyataan ini tidak benar, tetapi banyak sumber daya dan fasilitas yang luas tidak secara langsung menjamin bahwa pendidikan yang bermutu akan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, J. (2018). Otonomi Pendidikan Dan Pembiayaan Pendidikan. *Sabilaaarasyad*, 3(2548–2203), 26–37.
- Batubara, H. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan (Vol. 2, Issue 3).
- D. Polli, B. (2016). Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan dan Tanggung Jawab Pemerintah pada Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. *PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8, 430–435.
- Fatimah, S. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Mambaul Ulum Sumurgung Montong Tuban. *Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.35896/ijecie.v4i1.114>
- Habibi, R., & Artha Glory Romey Manurung. (2023). SLR Systematic Literature Review: Metode Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Human Performance Technology. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(2), 100–107.

<https://doi.org/10.52158/jacost.v4i2.511>

- Kholilah, E. (2016). Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia. *Ri'ayah*, 1, 138–151.
- Lazuardi, M. (2013). Desentralisasi Pendidikan Peluang Dan Tantangan. *Forum Paedagogik*, 5(01), 121–142. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JP/article/view/161>
- Masduki, G. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Ma'sum, T., Jayanti, D., & Nikmah, D. M. (2023). Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan Oleh. 3(1). <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/cjmp>
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.88>
- Nasihah, D., Fauzi, A., & Muin, A. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(1), 19–27. <https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., & at all. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 594–601.
- Nursofah, N., Rugaiyah, R., & Agus, S. (2023). Analisis Implementasi Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan. *Global Education Journal*, 1(3), 121–130.
- Putera, R. E. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Dalam Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di Kota Padang. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 229. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1322>
- Rosyid, A., & Ali, N. (2022). Latar Belakang Dan Visi Otonomi Pendidikan Di Indonesia. *Andragogi*, 4(3), 613–625.
- Sastypratiwi, H., & Dwi, R. (2020). Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review. *JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika)*, 6(2460–0741), 250–257.
- Sudarmono, Hasibuan, L., & Anwar, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Sudrajat, A. R. (2019). MADRASAH TSANAWIAH SATU ATAP (Penelitian di MTs SA Syifaurrahman Tasikmalaya) Asep Rahman Sudrajat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 166–182. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/226/194%0A>
- Tamam, B. (2018). Reorientasi Pendanaan Pendidikan dalam Membangun Mutu Sekolah. *Miskat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 29(2), 35–48. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Trihantoyo, S. (2020). Manajemen Keuangan Pendidikan. In PUSTAKA AKSARA (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.56488/scolae.v4i1.86>
- Wachyuppy, R. (2022). Pentingnya Otonomi Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Teaching and Learning* <Http://Journals.Eduped.Org/Index.Php/Intel> PENTINGNYA, 1(1), 151–161.

- Winarsih, S. (2018). Sistem Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Insania*, 18(25), 265–286.
- Yopy, O. :, & Dewanti, R. (2016). Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Suatu Tinjauan Konseptual Atas Sistem Anggaran Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (Lp3i) Tangerang. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 2(ISSN 2339-2991), 86–101.